

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pelayanan pemerintahan yang baik. Salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah yaitu dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Maksud dari laporan keuangan yang berkualitas yaitu informasi laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, tentunya pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, untuk pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya

kepada publik. Dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah harus mampu dan bisa membuat laporan keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas. Seperti yang tertera dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dikatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus bisa memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Untuk menentukan tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari seberapa baik sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Paradigma baru tentang otonomi daerah telah lahir sejak UU No. 23 Tahun 2014 diberlakukan yang membuat pemerintah daerah terus dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, untuk pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Menurut Dewi, (2020), pemerintah harus mampu dan bisa membuat laporan keuangan yang berisikan informasi yang berkualitas. Seperti yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di dalamnya dijelaskan bahwa laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Prinsip akuntansi dan pelaporan salah satunya yaitu terdapat pada prinsip penyajian wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang wajar yaitu menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan

saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Keuangan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang di buat dan disusun oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Pada era saat ini pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Maka dari itu etika kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen karyawan, tingkat pemahaman akuntansi serta fungsi badan pengawas akan membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Etika ada kaitannya dengan apa yang dilakukan pemimpin dan siapakah pemimpin itu. Hal itu terkait dengan karakter perilaku pemimpin, dan dengan integritas mereka. Menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas, etika kepemimpinan sangat diperlukan. Prinsip kepemimpinan yang etis adalah pemimpin yang etis menghargai orang lain, pemimpin yang etis melayani orang lain, pemimpin yang etis itu objektif, pemimpin yang etis itu jujur, dan pemimpin yang etis membangun komunitas. Badan pemerintahan memerlukan seorang pemimpin yang memiliki etika yang baik.

Dalam melakukan sebuah pekerjaan etika menjadi hal yang sangat penting dikarenakan bisa mempengaruhi hasil dari pekerjaan tersebut. Menurut Griffin (2006:58), "etika" diartikan sebagai percaya atau yakin dengan perbuatan yang baik

dan salah, atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan yang baik dan buruk yang nantinya akan mempengaruhi hal yang lainnya. Suatu perilaku bisa dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis bisa dilihat dari nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial. Aparatur pemerintah dikatakan sebagai pelayanan publik yang berfungsi memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat untuk pengaturan dan pelayanan kebutuhan publik. Hasil penelitian dari Veliani (2021) menemukan hasil bahwa etika kepemimpinan juga memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singing. Sedangkan hasil penelitian dari Sari, dkk (2018) menemukan hasil bertentangan, hasil penelitian menemukan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang karyawan berwujud pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai, keyakinan, dan motif yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif sehingga pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan. Agar laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, maka SDM diharapkan memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam membuat laporan

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Veliani (2021), dalam penerapan dan memahami logika akuntansi yang dapat menjadi kegagalan sumber daya manusia Pemerintahan Daerah sehingga berdampak terhadap kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Pada variabel kompetensi sumber daya manusia juga masih banyak ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Veliani (2021) menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPD Kabupaten Kuantan Singing. Selanjutnya penelitian dari Oktavia dan Rahayu (2019) menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPD Kota Bandung. Hasil penelitian dari Kartika dan Safitri (2018) juga menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPD Jember. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Julie (2021) menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPD Maluku. Sedangkan hasil penelitian dari Philadelphia, dkk (2020) menemukan hasil bertentangan, hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Klaten.

Selain kompetensi sumber daya manusia, untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dengan adanya komitmen karyawan.

Menurut Fibriyani, dkk (2021) dalam pengelolaan keuangan daerah agar bisa mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, komitmen karyawan sangat dibutuhkan dalam instansi pemerintah untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi, dan juga untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah, sehingga bisa tercipta loyalitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam instansi pemerintah juga sangat dibutuhkan komitmen karyawan dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi, serta untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah agar tercipta loyalitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Komitmen karyawan adalah suatu kondisi dimana pegawai memiliki unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dalam tujuan organisasi (Nova 2015). Seorang individu harus memiliki komitmen yang tinggi agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi. Komitmen afektif, komitmen kontiniu, dan komitmen normatif menjadi indikator komirmen karyawan. Pada variabel komitmen karyawan juga masih banyak ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fibriyani, dkk (2021) menemukan hasil bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPD Kabupaten Gianyar. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Nugraha, dkk (2020) menemukan hasil bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Kota Bandung. Sedangkan hasil penelitin dari Nova (2015) menemukan hasil bertentangan, hasil penelitian menemukan bahwa komitmen karyawan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sijunjung.

Dalam membuat laporan keuangan, seorang akuntan harus memahami isi dalam

laporan tersebut. Jika seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dapat dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti dan paham bagaimana suatu proses akuntansi dilakukan sehingga menjadi laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Suatu laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas apabila dapat menyajikan informasi didalam laporan keuangan yang dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyimpang dan kesalahan material, dan menyampaikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Suatu informasi laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi yang disajikan bisa mendukung pada saat pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakainya. Pada variabel tingkat pemahaman akuntansi juga masih banyak ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fibriyani, dkk (2021) menemukan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Kabupaten Gianyar. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan Zalni (2013) menemukan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Sumatera Barat. Hasil penelitian yang dilakukan Hikalmi dan Ibna (2019) menemukan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Aceh. Yang terakhir penelitian yang dilakukan Diani (2014) menemukan hasil bahwa pemahaman akuntansi

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Kota Pariaman. Sedangkan hasil penelitian dari Nova (2015) menemukan hasil bertentangan, hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Sijunjung.

Fungsi badan pengawas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Landya (2020), dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya dikerjakan oleh seorang akuntan tetapi akan dibantu oleh badan pengawas. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel maka pemerintah harus meningkatkan peran dan fungsi dari badan pengawas intern keuangan daerah. Dalam penelitian ini badan pengawas intern keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Inspektorat Daerah. Untuk saat ini inspektorat daerah diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Jadi salah satu cara melihat apakah laporan keuangan yang telah di susun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah kemudian sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dan bisa dilihat dari opini auditor. Pada variabel fungsi badan pengawas juga masih banyak ditemukan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anshori (2018) menemukan hasil bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Bantul. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian Yanti dan Made (2020) menemukan hasil bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Malang. Dan Ridwan (2021) menemukan hasil bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SKPD Kerinci. Sedangkan hasil peneliti dari Landya (2020) dan Veronica (2021) menemukan hasil bertentangan, hasil penelitian menemukan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena atau motivasi riset penelitian ini yaitu berdasarkan data demografi Karangasem adalah merupakan kabupaten di Bali dengan tingkat kepadatan penduduknya paling rendah yaitu 522.729 akan tetapi tingkat penganggurannya besar dan termasuk dalam salah satu kabupaten miskin. Akan tetapi dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem setiap tahunnya mendapatkan predikat sangat baik, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah kabupaten Karangasem bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dilihat dari kondisi kabupaten Karangasem pada saat ini yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di provinsi Bali.

Dilihat dari berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada

Pemerintah Kabupaten Karangasem, dari tahun 2005-2014 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Khusus untuk Kabupaten Karangasem pernah mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat/Disclaimer atas LKPD tahun 2010 dan 2013. Hal ini menceminkan Kabupaten Karangasem masih memerlukan banyak perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil pemeriksaan BPK. Namun dari tahun 2015-2021 Kabupaten Karangasem berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana keberhasilan ini menjadi keenam kalinya bagi Pemkab Karangasem mempertahankan WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dengan demikian, maka laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem naik satu tingkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tak lepas dari bantuan seluruh pihak terutama sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Karangasem sehingga laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana setiap tahunnya laporan keuangan Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan kabupaten karangasem sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut, Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Karyawan, Tingkat Pemahaman Akuntansi Dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem (Studi Empiris Pada Seluruh Dinas Di Kabupaten Karangasem).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 2) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 3) Apakah komitmen karyawan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 4) Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?
- 5) Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh komitmen karyawan terhadap kualitas laporan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini :

##### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi studi, pengetahuan dan disiplin ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi khususnya dalam kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

##### **2) Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan bagi pengelola pemerintah mengenai pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah yang dapat memenuhi harapan masyarakat tentang penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik, tepat dan akurat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

*Agency Theory* adalah perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para *agent* untuk bekerja sesuai dengan keinginan *principal*. Di Indonesia pada organisasi publik yaitu dipemerintahan daerah secara sadar atau tidak teori keagenan ini telah dipraktikan. Praktek pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik telah didasari oleh suatu konsep dari teori keagenan berdasarkan dengan masalah keagenan. Menurut Artana (2016), pelaporan keuangan merupakan salah satu jenis alat pemantauan untuk mengurangi biaya keagenan (*agency cost*). Bahkan, teori agen berpendapat bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen* sehingga menimbulkan konflik kepentingan (*agency problem*).

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah berfungsi sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga dituntut untuk berlaku transparan dan juga melibatkan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menciptakan dan menyajikan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat

digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*) dilihat dari hubungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan daerah. Pemerintah berperan sebagai agen untuk mengelola keuangan dengan baik, namun pengelolaan fiskal yang baik melibatkan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menetapkan kebijakan. Dalam hubungan keagenan, pemerintah daerah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai principalnya.

### **2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran preskriptif yang harus diterapkan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Syarat agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diharapkan yaitu dengan memenuhi empat karakteristik yaitu:

#### **1. Relevan**

Jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan. Dengan cara ini informasi laporan keuangan akhir yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaan. Informasi yang relevan yaitu:

- 1) Memiliki keuntungan dari umpan balik (*feedback value*). Dengan kata lain, informasi ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi atau mengubah

harapan masa lalu.

- 2) Memiliki nilai prediksi (*predictive value*), Informasi membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini.
- 3) Tepat waktu, artinya informasi disajikan secara tepat waktu sehingga lebih berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin dan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan memperhatikan keterbatasan yang ada. Informasi menjadi latar belakang untuk setiap informasi material yang terkandung dalam laporan keuangan dan diungkapkan secara jelas dikemudian hari sehingga dapat menghindari adanya kesalahan atau kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut.

## 2. *Reliable/Andal*

Informasi dalam laporan keuangan tahunan yang dihasilkan bebas dari pengetahuan yang menyesatkan atau kesalahan material, benar dalam segala hal dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan jika sifat atau representasinya tidak dapat diandalkan. Informasi dapat dikatakan andal apabila bisa memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diperiksa dan hasilnya menunjukkan kesimpulan yang tidak

berbeda secara signifikan ketika pengujian dilakukan berkali-kali oleh pihak yang berbeda.

- c. Netralitas, informasi ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak memihak pihak tertentu.

### 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih bermanfaat bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan umum entitas pelapor lainnya. Perbandingan bisa internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan jika perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan ketika perusahaan yang sebanding menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Perubahan dapat diungkapkan dalam periode di mana perubahan terjadi jika agensi menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih unggul daripada yang digunakan saat ini.

### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pemakai dan disesuaikan dengan batas pemahamannya. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang baik tentang aktivitas dan lingkungan operasi perusahaan pelapor dan bersedia mempelajari informasi yang relevan.

#### **2.1.3 Etika Kepemimpinan**

Menurut Suseno etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Menurut Terry kepemimpinan

adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Jadi semakin tinggi etika yang dimiliki oleh pemimpin untuk mengontrol atau memberi arahan kepada pengikutnya, maka pemimpin tersebut akan lebih dipercaya oleh pengikutnya dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, etika menjadi salah satu faktor keberhasilan terpenting dalam organisasi pemerintahan. Etika kepemimpinan dapat terwujud apabila :

- 1) Pemimpin memiliki sifat jujur kepada pengikutnya.
- 2) Pemimpin dapat dipercaya oleh para pengikutnya.
- 3) Dapat bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengan cara menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 4) Memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain.
- 5) Dapat menerima saran dan kritik yang diberikan oleh pengikutnya.
- 6) Dapat menilai dan memahami kinerja para pengikutnya.
- 7) Memiliki hubungan yang positif dengan pengikutnya.

#### **2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kata kompetensi berasal dari kata *competence* atau *competency*, yang berarti kecakapan, kemampuan, atau kewenangan. Dilihat dari pengertian tersebut maka kompetensi dapat diartikan sebagai kapasitas kemampuan, kecakapan seseorang dalam melaksanakan atau mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah menjadi keahliannya. Menurut Veliani (2021) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas yang dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja di suatu

organisasi, maka kompetensi SDM harus berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sehingga, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi akurat, efektif, dan efisien karena dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sumber daya manusia menjadi aset yang sangat membantu dalam sebuah organisasi dimana pada proses akuntansi yang berperan dalam hal ini adalah pemerintah dan pegawai.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Laporan bisa dikatakan berkualitas atau tidak dilihat dari apabila sumber daya manusia dari suatu organisasi ataupun instansi tidak berkompeten, maka hasil dari kualitas laporan keuangan daerah yang dikeluarkan akan mengalami penurunan/kurang berkualitas. Begitu juga sebaliknya jika sumber daya manusia dari suatu organisasi atau instansi itu berkompeten, maka hasil dari laporan keuangan daerah yang dikeluarkan akan baik/berkualitas. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi sumber daya manusia yaitu sebagai berikut :

#### 1. Motif

Motif adalah sesuatu yang selalu di pikirkan atau di inginkan orang – orang yang mengilhami mereka untuk mengambil suatu tindakan. Motivasi mendorong, mengarahkan, dan memilih tindakan menuju perilaku dan tujuan tertentu.

#### 2. Sifat

Sifat adalah karakteristik fisik dan reaksi yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman matamerupakan ciri fisik dari kemampuan manusia.

### 3. Konsep diri

Konsep diri adalah sikap, nilai, atau citra diriseseorang. Percaya diri adalah keyakinan seseorang bahwa mereka bisa efektif di hampir semua situasi dan merupakan bagian daribagaimana orang melihat diri mereka sendiri.

### 4. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimilikiseseorang dalam bidang tertentu.

Pengetahuanadalah keterampilan yang kompleks.

### 5. Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu, sedangkan kemampuan mental atau kognitif mencakup pemikiran analitis dan konseptual.

#### **2.1.5 Komitmen Karyawan**

Komitmen karyawan adalah suatu kondisi dimana pegawai memiliki unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dalam tujuan organisasi. komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku individu dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Hal ini berdasarkan cara pengembangan tujuan dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang pada intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Fibriyani, dkk 2021). terdapat tiga komponen komitmen yaitu sebagai berikut :

1. Komitmen Efektif (*Affective commitment*)

Komitmen efektif Ini adalah proses perilaku dimana seseorang mempertimbangkan hubungan mereka dengan organisasi dalam hal kesesuaian nilai-nilai pribadi mereka yang secara langsung mempengaruhi keinginan mereka untuk tetap bersama organisasi..

2. Komitmen Kontiniu (*Continuance commitment*)

Komitmen Kontiniu didasarkan pada ikatan dalam hubungan dengan anggota organisasi pemerintah, dan karyawan didorong oleh organisasi karena biaya (ekonomi, sosial, dan hubungan status) yang dikeluarkan ketika meninggalkan organisasi pemerintah. Biaya memanifestasikan dirinya dalam dua cara yang berbeda. Pertama, kami percaya bahwa masa jabatan individu dalam organisasi pemerintah menumbuhkan loyalitas, terutama karena adanya skema pensiun, senioritas, spesialisasi keterampilan, afiliasi dan ikatan keluarga, dan bahwa mereka cenderung tidak membahayakan diri mereka sendiri jika mereka berganti organisasi. Kedua, individu mungkin merasa bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk tinggal di organisasi karena tidak ada pekerjaan lain yang menjanjikan.

3. Komitmen Normatif (*Normative commitment*)

Keinginan karyawan untuk tetap berada di organisasi, yang mungkin disebabkan oleh budaya individu atau etos kerja dimana karyawan dituntut untuk tetap berada di organisasi karena komitmen terhadap tugas yang diberikan kepada bawahan meningkat. Dengan demikian, loyalitas untuk

bekerja yang mendasari tugas normatif manajer publik mempengaruhi individu untuk tetap berada di organisasi tempat mereka bekerja. Di sisi lain, loyalitas tugas, yang mendasari komitmen normatif, mempengaruhi individu untuk bertahan dalam organisasi.

### **2.1.6 Tingkat Pemahaman Akuntansi**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia paham memiliki arti pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman memiliki arti proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman akuntansi dapat diartikan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik, untuk lebih memahami akuntansi lebih luas dan menangkap lebih baik, mengetahui prosedur dan sistem akuntansi, standar akuntansi yang berlaku, kebijakan akuntansi serta bisa memahami komponen-komponen laporan keuangan yang nantinya dihasilkan oleh setiap entitas baik dalam entitas akuntansi maupun entitas pelaporan (Fibriyani, dkk 2021). Berdasarkan pedoman prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan seseorang dapat dikatakan paham terhadap akuntansi yaitu pandai dan mengerti mengenai proses penyusunan akuntansi dilakukan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menurut Atika, dkk (2018), pengertian pengetahuan akuntansi dapat dilihat dari dua sisi yang pertama yaitu sebagai disiplin pengetahuan berdasarkan yang didapat diperguruan tinggi, kemudian sebagai pengetahuan profesi (keahlian) seperti yang dipraktikkan di dunia nyata. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan komponen laporan keuangan terdiri dari :

### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

### 2. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

### 3. Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

### 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 5. Laporan Operasional (LO)

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE Neraca, LAK. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Adapun proses atau siklus akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

##### 1) Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan jual beli antara satupihak dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dengan pihak lain. Transaksi ini kemudian tercermin dalam laporan keuangan organisasi.

##### 2) Analisis bukti transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

##### 3) Mencatat Data Transaksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

#### 4) Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan

Data yang dicatat (Posting) dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.

#### 5) Penerbitan Laporan dan Catatannya Selama satu periode akuntansi

Transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

### **2.1.7 Fungsi Badan Pengawas**

Salah satu faktor yang mempengaruhi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan adanya fungsi badan pengawas. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diartikan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditunjukan untuk menanggungjawabkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel maka pemerintah harus meningkatkan peran dan fungsi dari badan pengawas intern keuangan daerah. Dalam penelitian ini badan pengawas intern keuangan pemerintah daerah yang

dimaksud adalah Inspektorat Daerah.

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta melakukan revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum disampaikan bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Pasal 2(2) berbunyi Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan..

Adapun ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Audit/pemeriksaan regular atau berkala terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Audit/pemeriksaan tematik terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, audit/pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik.

5. Audit laporan keuangan di SKPD.
6. Audit kinerja SKPD.
7. Audit tujuan tertentu SKPD.
8. Review terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
9. Evaluasi terhadap rencana Rencana Startegi (Renstra) SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral Kementrian dan Baadan pemeriksaan keuangan.
11. Monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaran Pemerintah Daerah.
12. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.

## **2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya**

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Veliani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Etika Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini menggunakan tiga variable independen

yaitu kompetensi sumber daya manusia, etika dan gaya kepemimpinan dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, etika dan gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Oktavia dan Rahayu (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Skpd Di Kota Bandung Tahun 2018)”. Penelitian ini menggunakan tiga variable independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Skpd Di Kota Bandung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan Software IBM SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Kartika dan Safitri (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini menggunakan dua variable independen yaitu kualitas sumber daya manusia dan

pemanfaatan teknologi informasi dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lumajang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memang memiliki pengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Fibriyani, dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kab. Gianyar”. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah OPD Kab. Gianyar. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kab. Gianyar.

Nugraha, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung”. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu kompetensi pegawai dan komitmen organisasi dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bandung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dan komitmen organisasi memang memiliki pengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Zalni (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Komitmen Karyawan Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dpkd Kota Di Sumatera Barat)”. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (Spip) dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Dpkd Kota Di Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel komitmen karyawan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (Spip) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dpkd Kota Di Sumatera Barat.

Hikalmi dan Ibna (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (E-Mpa) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara”. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksanaan anggaran (e-mpa) dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel pemahaman akuntansi dan elektronik monitoring pelaksana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Aceh Utara.

Diani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”. Penelitian ini menggunakan tiga variable independen yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Anshori (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini menggunakan tiga variable independen yaitu pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah Skpd Pemerintah Kabupaten Bantul. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

pemerintah daerah, sedangkan variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ridwan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci)”. Penelitian ini menggunakan dua variable independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah digunakan, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yaitu etika kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen karyawan, tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas sedangkan variabel dependen pada penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu kualitas laporan keuangan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yaitu pada SKPD. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada waktu pelaksanaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.